

MODEL SEKOLAH YANG MEMANUSIAKAN TINJAUAN TEORI STRUKTURAL KONFLIK

Ahmad Syauqi Fuady¹

STIT Muhammadiyah Bojonegoro⁽¹⁾

syauqi.asf68@gmail.com

Abstrak

Pendidikan menjadi instrumen kelas dalam mempertahankan posisi dan kedudukan kelas. Kelas atas mendapat akses dan kesempatan pendidikan berkualitas, sesuatu yang sulit didapat kelas menengah dan bawah. Suasana yang demikian, dalam perspektif konflik, akan makin menciptakan jurang pemisah antarkelas dan golongan. Penyediaan akses dan kesempatan setara memperoleh pendidikan dalam Konstitusi merupakan kewajiban negara. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Alternatif pendidikan dalam bentuk sekolah berperspektif memanusiakan manusia sebagaimana kedudukan dasarnya, penting ditawarkan agar tidak terjebak pemikiran bahwa pendidikan hanya untuk memenuhi tuntutan dan persaingan perebutan kepentingan industri dan kemajuan ekonomi. Sekolah yang memanusiakan setidaknya berusaha mewujudkan tiga hal dalam proses dan capaian yang diinginkan. (1) Sekolah yang mendidik karakter. Menjadikan karakter sebagai tujuan utama, sebagaimana selayaknya bahwa usia pendidikan itu sama dengan usia pendidikan karakter; (2) Sekolah yang mengajarkan murid untuk belajar, bukan sekolah tempat guru mengajar dan siswa diajar; (3) Sekolah yang membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketertinggalan serta mampu jadi anak tangga yang sesungguhnya bagi tiap orang untuk merubah status sosialnya. Selain itu juga sebagai sekolah yang tidak terpisah dengan lingkungan tempatnya hidup..

Kata Kunci : *teori, structural konflik, sekolah, memanusiakan*

Abstract

Education becomes a class instrument in maintaining class position and status. The upper class has access and opportunities for quality education, something that is difficult for the middle and lower classes to obtain. Such an atmosphere, from a conflict perspective, will increasingly create gaps between classes and groups. Providing equal access and opportunities to obtain education in the Constitution is a state obligation. The community is also given the opportunity to get involved in the provision of education. It is important to offer alternative education in the form of schools with the perspective of humanizing humans according to their basic position so that they do not fall into the trap of thinking that education is only to meet the demands and competition for industrial interests and economic progress. A humanizing school at least tries to realize three things in the process and desired achievements. (1) Schools that educate character. Make character the main goal, as it is appropriate that the age of education is the same as the age of character education; (2) Schools that teach students to learn, not schools where teachers teach and students are taught; (3) Schools that liberate people from poverty and backwardness and are able to become a real ladder for each person to change their social status. Apart from that, it is also a school that is not separated from the environment in which it lives.

Keywords : *theory, structural conflict, school, humanizing.*

PENDAHULUAN

Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terjadi saat adanya konflik, utamanya karena perebutan sarana-sarana produksi, alih-alih terjadi karena internalisasi dari nilai-nilai baru yang dibawa ke masyarakat. Konflik di dalam masyarakat sebagai trigger terjadinya perubahan dapat terjadi antarindividu, antarkelompok, antarkepentingan kelas, dan antarnegara. Salah satu pendekatan dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam struktur hirarki masyarakat yang berbeda (Tualeka, 2017). Pisau analisis yang digunakan dalam teori konflik bahwa anggota masyarakat dapat dikategorikan ke dalam kategori orang yang berkuasa dan yang dikuasai (Tumengkol, 2012).

Konflik dalam pandangan teori ini bukanlah sebagai bentuk perubahan secara radikal dan revolusioner. Teori konflik menaruh perhatian besar bahwa perbedaan pendapat dan konflik sebagai penyebab dinamika di dalam masyarakat. Konflik seringkali ditandai dengan perbedaan kepentingan dan kewenangan (otoritas) yang mengarah kepada superioritas dan subordinasi. Konflik dalam pandangan teori ini dinilai sebagai hal yang diperlukan untuk menghadirkan perubahan di dalam masyarakat. Teori konflik yang menekankan konflik dan perbedaan kepentingan antarkelas lahir sebagai respons terhadap teori fungsional yang memandang Masyarakat sebagai kondisi keseimbangan yang cenderung statis (Nugroho, 2021).

Kritik yang muncul terhadap teori konflik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu teori kritik dianggap mengabaikan kestabilan dan ketertiban di dalam Masyarakat. Selain itu, teori konflik memiliki dasar ideologi yang cenderung radikal karena menilai konflik sebagai sumber perubahan dan perkembangan Masyarakat (Nugroho, 2021). Adanya kelas sosial yang berdampak kepada ketimpangan sosial menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan hubungan antar individu secara horizontal. Kondisi ini dapat mengarah kepada kebencian antar individu yang jika terus dipupuk akan menghadirkan stigma dan kemarahan sosial (Fadilah, 2001).

Dunia industri modern saat ini telah merambah dan memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan. Pendidikan dilihat sebagai sebuah komoditas bisnis jasa yang diperdagangkan sehingga menyebabkan pendidikan tidak lagi dilihat sebagai upaya kemanusiaan untuk mengembangkan segala potensi manusia untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang unggul (Nata, 2012). Pendidikan kental dengan nuansa transaksional dan mekanistik: apa timbal balik yang akan diperoleh setelah menamatkan pendidikan? bagaimana prospek lulusannya dalam bersaing di dunia kerja? Kondisi ini menjadi prakondisi yang mencipatak dan melanggengkan adanya kompetisi antar kelas masyarakat: kelompok atas dengan menengah dan bawah.

Tujuan pendidikan dalam iklim yang dijelaskan di atas bergeser ke arah upaya untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil bagi dunia industri. Pendidikan semata-mata dinilai dari sudut pandang ekonomis untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi-industri. Pendidikan dalam konteks ini menjadi alat perpanjangan tangan kelas pemilik modal yang dominan dalam struktur sosial masyarakat. Efek yang ditimbulkan kemudian adalah pendidikan menjadi alat yang melanggengkan determinasi kultur dominan atas kultur bawah yang tersubordinasi. Siswa yang berasal dari kelas menengah-atas akan memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih pendidikan tinggi dan kesuksesan karena hubungan yang lebih dekat dengan kultur dominan dibandingkan dengan kultur kelas bawah yang lebih kecil peluangnya (Maliki, 2010).

Sejalan dengan kondisi-kondisi yang demikian pengelola lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, juga berlomba-lomba meningkatkan biaya pendidikan. Ada sebuah pola pikir yang terbangun bahwa sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mahal. Kualitas lembaga pendidikan adalah linier dengan sejumlah banyak uang yang diinvestasikan untuk biaya pendidikan. Lembaga pendidikan yang unggul adalah identik dengan mahalnya biayanya. Logika yang terbangun demikian inilah, maka ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat akan senantiasa terbentuk.

Keadilan untuk mengakses pendidikan berkualitas bagi kaum papa berjarak sangat lebar agar bisa terwujud. Pendidikan oleh karenanya menjadi anugerah dan surga bagi kelas menengah-atas yang diidam-idamkan oleh kalangan bawah. Semakin tinggi tingkat ekonomi sebuah keluarga, maka semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan (Maliki, 2010). Mahalnya biaya menjadi tembok penghalang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya lewat pendidikan yang layak dan berkualitas (Basri, 2014).

Kondisi yang demikian ini bertolak belakang dengan cita-cita negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tugas negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada kecuali apakah mereka orang kaya ataupun orang miskin. Tidak peduli apakah di ujung barat Pantai Aceh atau daerah pesisir di Papua. Prinsip konstitusional penyelenggaraan pendidikan menurut Anies Baswedan, yaitu tidak pandang letak geografis tempat tinggal mereka dekat pemerintahan atau di ujung perbatasan, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa adalah sebuah janji yang harus dilunasi untuk setiap anak bangsa Indonesia” (Chatib, 2012).

Hak atas pendidikan (HAP) menjadi salah satu dinilai sebagai fondasi penting bagi upaya pencerdasan dan memajukan bangsa dan negara. Pendidikan sebagai perkara serius sejak awal Republik ini didirikan, di mana pendidikan merupakan instrumen yang harus dilaksanakan negara, siapa pun pemerintah yang sedang memiliki kewenangan. Hak Atas Pendidikan (HAP) warga negara Indonesia berhadapan dengan beberapa persoalan, yaitu terkait kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas antara perkotaan dan perdesaan. Persoalan lain adalah berkaitan dengan kesempatan setiap anak bangsa dapat mengenyam pendidikan. Hal ini terkait ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai di setiap daerah, baik kota dan desa (Affandi, 2017).

Pendidikan sebagai amanat Konstitusi menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Perjalanan Republik ini semenjak sebelum Merdeka menunjukkan bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Dalam persoalan pendidikan, pemerintah membuka dengan tangan terbuka akan keterlibatan masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan masyarakat diakui negara penting, dan dijadikan partner dan aktor penting dalam memenuhi tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat dapat Bersama-sama pemerintah dalam menunaikan kewajiban konstitusi dalam menyediakan akses, kesempatan, dan pemerataan pendidikan berkualitas.

Masyarakat secara luas memiliki kesempatan untuk terlibat menghadirkan solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan ini, akses pendidikan berkualitas dan pemerataan kesempatan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan upaya terobosan untuk memunculkan lembaga pendidikan atau sekolah alternatif yang memiliki komitmen untuk memanusiakan manusia, memiliki kualitas unggul, dan biaya yang dapat diakses oleh semua golongan (Bahrudin, 2007). Sekolah yang memiliki keberpihakan, inklusifitas, dan kesempatan terbuka pada semua golongan masyarakat, education for all.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data Pustaka, pengumpulan data berupa kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2004). Objek penelitian kepustakaan merupakan data kepustakaan yang dalam hal ini berupa buku, kitab, dan sumber data kepustakaan lainnya dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada (Evanirosa et al., 2022).

Sumber data primer penelitian ini adalah teori structural konflik. Sumber data sekunder berupa data-data tertulis baik itu buku-buku, hasil kajian dan penelitian, maupun sumber lain yang mengulas tentang teori structural konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Teori Struktural Konflik

Teori Struktural konflik lahir sebagai antitesa atas teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai kesatuan fungsional yang bergerak dan berusaha untuk mencapai keseimbangan (ekuilibrium) dan kestabilan sosial. Masyarakat dinilai memiliki kecenderungan untuk integrasi dan tampak statis. Dalam sudut pandang lain, struktural fungsional mendukung *status quo (homeostatik)*. Berseberangan dengan teori ini, struktural konflik menilai masyarakat senantiasa bergerak dan dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat senantiasa terjadi yang dimulai karena adanya konflik, pertentangan, dan ketegangan. Konflik, pertentangan, dan ketegangan dalam masyarakat, menurut teori struktural konflik, alpa dinilai dalam pandangan struktural fungsional (Maliki, 2010).

Teori struktural konflik tidak akan mungkin dilepaskan dari sosok Karl Marx, sebagai pencetusnya. Kemelaratan, kemiskinan, dan penindasan yang dialami oleh kelas pekerja (buruh) oleh pemilik alat-alat produksi (pemodal) menjadi pemicu utama Karl Marx mencetuskan teori konflik. Eksploitasi manusia dalam sistem kapitalistik harus diubah agar menjadi sistem yang lebih manusiawi dan menciptakan keadilan.

Asumsi-asumsi dasar teori konflik yang dibangun oleh Karl Marx, diantaranya bahwa, *pertama*, perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. *Kedua*, konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam masyarakat. *Ketiga*, setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terciptanya disintegrasi dan perubahan sosial. *Keempat*, integrasi masyarakat terjadi oelh adanya dominasi atau penguasaan sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya (Maliki, 2010). Konflik sebagai unsur utama perubahan masyarakat, terjadi karena ketegangan terus-menerus yang terjadi antara kelompok dominan atau determinan dengan kelompok ter subordinasi. Kondisi ketegangan antarkelas ini melahirkan perjuangan atau konflik antarkelas dalam hubungannya dengan penguasaan mode-mode produksi.

Sejarah, dalam pandangan Marx dilihat sebagai proses dialektika yang ditentukan oleh faktor-faktor kenyataan material. Marx menentukan mode-mode produksi sebagai bangunan bawah (*structure*) yang menentukan terbentuknya bangunan atas (*superstructure*) baik itu agama, pendidikan, ekonomi, kesenian, politii, budaya, dan berbagai bentuk kesadaran sejarah lainnya (Maliki, 2010). Berbagai sistem yang ada dalam bangunan atas bukanlah kenyataan yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk sebagai sebuah cerminan penguasaan dan perebutan kepentingan atas faktor-faktor hubungan produksi.

Pendidikan, dalam pandangan teori konflik, dilihat sebagai upaya perpanjangan tangan dari klas pemodal dan pemilik produksi untuk terus melanggengkan dominasinya. Pendidikan dan pengetahuan adalah alat sosial bagi kalangan atas untuk mempertahankan status sosialnya.

Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk perubahan sosial, vertikal dan horizontal, yang dapat dinikmati oleh semua golongan, nyatanya hanya mampu dinikmati oleh segelintir kelompok. Dalam situasi yang demikian, maka pendidikan sebagai alat penentu arah perkembangan masyarakat, tidak akan mampu mewujudkan keadilan, sebaliknya malah akan semakin mempertajam jurang antarkelas dan antar golongan. Akhirnya, dominasi golongan kelas atas terhadap golongan kelas bawah akan terus terjadi. Sekolah dan pendidikan tidak menajdi *ikhtiar* untuk memanusiakan manusia sebagaimana kedudukan asasinya, melainkan hanya untuk memenuhi tuntutan dan persaingan perebutan kepentingan industri dan kemajuan ekonomi.

Sekolah yang Memanusiakan

Sekolah pada dasarnya adalah upaya pemanusiaan dengan tujuan untuk mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi baik yang dimiliki manusia. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dijelaskan pula bahwa, dalam Bab II Pasal 3 UU ini disebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan lebih dari sekadar menyiapkan manusia sebagai sumber utama kegiatan ekonomi dan produksi. Pendidikan menjadi upaya yang dipilih secara sadar dalam memajukan kehidupan umat manusia, bangsa, negara, dan masyarakat dengan lebih dahulu mengembangkan dan memajukan potensi-potensi manusia.

Mendidik Untuk Karakter

Berbicara tentang karakter ini, lebih dulu kita simak kutipan panjang bagian dari pidato yang disampaikan oleh Bung Hatta dalam Swasono (1980) tentang pentingnya mendidik karakter di hadapan para alumni Universitas Indonesia tahun 1957 berikut ini:

“Apabila membentuk manusia susila dan demokratis yang insyaf akan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat nasional dan dunia seluruhnya menjadi tujuan yang terutama daripada perguruan tinggi, maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak. Memang, itulah menurut pendapat saya tujuan daripada universitas atau sekolah tinggi. Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang

yang cerdas dan tajam otaknya, akan tetapi manusia yang berkarakter tidak diperoleh dengan begitu saja. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi suatu yang tidak benar. Pendidikan ilmiah pada perguruan tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu, karena –seperti saya katakan tadi- ilmu ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.”

Mendidik untuk karakter berarti kita menginginkan peserta didik kita mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar (Lickona, 2013). Mencari dan membela suatu yang benar. Oleh karena itu, lembaga pendidikan atau sekolah yang bertujuan memanusiakan manusia hendaknya dan seharusnya meletakkan karakter di garis terdepan tujuan yang harus diwujudkan.

Mendidik karakter, sebagaimana pidato Bung Hatta, akan memberikan dua keunggulan sekaligus: kepribadian yang baik dan kecerdasan. Karena pada dasarnya karakter mencerminkan dua kualitas seorang individu sekaligus: kualitas kepribadian dan potensi bakat. Kepribadian yang mencerminkan kualitas moral dan perilaku yang baik seseorang dan kualitas bakat dan potensi khas seorang yang menciptakan keunggulan yang membedakan dengan orang lain (Latif, 2009).

Konsep demikian ini menuntut perubahan sistem pengajaran di sekolah yang lebih memuliakan karakter kepribadian dan potensi khas siswa (*individual-centered school*). Kurikulum utama dibatasi dan memberikan keleluasaan serta kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas sesuai minat dan potensi khususnya (Latif, 2009). Pendekatan semacam ini menjadikan pendidikan di sekolah dapat diarahkan ke arah pendidikan yang berbasis karya individual dari peserta didik (Bahrudin, 2007).

Pengalaman menarik dari beberapa negara layak disampaikan dalam tulisan ini. Pendidikan karakter seringkali diintroduksikan lewat medium kesusastraan dengan keteladanan para pahlawannya. Di Inggris, puisi-puisi Shakespreare menjadi bacaan wajib untuk menanamkan tradisi etik dan kebudayaan masyarakat. Di Swedia, aneka spanduk dibentangkan di hari raya berisi kutipan dari karya kesusastraan. Di Prancis, sastrawan-sastrawan agung menghuni *pantheon* (Latif, 2009).

Kondisi paradoks terjadi di Indonesia, pengajaran sastra di Indonesia kalah mentereng dan beken dibandingkan pelajaran sains dan eksak. Pengajaran sastra di sekolah-sekolah di Indonesia mengalami kemerosotan luar biasa. Perlu ada perhatian serius untuk menjadikan sastra sebagai medium untuk mengajarkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Kemerosotan pengajaran sastra bisa jadi ekuivalen dengan kemerosotan pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk dicatat kegelisahan penyair ternama Taufiq Ismail dalam Rahman (2008) berikut ini:

“Sebelum Indonesia Merdeka, pengajaran sastra di sekolah-sekolah kita sudah sedemikian baiknya. Yaitu, masa ketika siswa-siswa *Algemeene Middelbare School* (AMS) membaca sedikitnya 25 buku selama mereka belajar di bangku sekolah setingkat SMA itu, dalam 4 bahasa pula. Mutu bacaan mereka itu kurang-lebih sama dengan mutu bacaan siswa-siswi SMA di berbagai negara maju di Amerika dan Eropa hari ini. Inilah sejarah yang alpa dan mencengangkan: sejak 60 tahun lebih silam, siswa-siswa SMA kita hanya membaca 0 buku sastra, tentu dengan sedikit sekali pengecualian.”

Mendidik untuk Belajar

Manusia pada dasarnya adalah seorang makhluk pembelajar dalam setiap konteks perkembangan budaya tertentu (Chatib, 2012). Kondisi ini memberikan suatu jaminan bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki kesiapan dan kemauan untuk senantiasa belajar. Kemudian, tergantung bagaimana stimulus yang diterimanya memengaruhi intensi masing-masing orang dalam belajar. Manusia selalu akan berusaha terus-menerus untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Perkembangan kehidupan yang tidak pernah berhenti meminta kepada manusia untuk tidak pernah berhenti belajar nilai-nilai dan ilmu-ilmu baru agar tetap bisa mempertahankan statusnya sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. *Tokh*, ilmu pengetahuan, menurut Sutan Sjahrir, sebagaimana dituliskan Ignas Kelden, bukanlah perkara lahiriah dan benda mati, melainkan sebagai hakikat yang hidup dan perlu selalu dipupuk dan dipelihara (Anwar, 2011). Belajar menjadi prasyarat utama untuk menghidupkan ilmu dan mengilmukan hidup. Sejalan hal ini dengan prinsip *long-life education*.

Sekolah seharusnya mampu untuk menjadi tempat pembudayaan nilai-nilai baru yang berkembang seiring dengan laju kehidupan yang terus menderu. Sebagai tempat pembudayaan, sekolah sejatinya harus menjadikan dirinya sebagai tempat belajar yang nyaman dan membebaskan bagi siapa saja yang belajar di dalamnya. Sebab, praktik yang umum berkembang saat ini, sekolah bukanlah tempat untuk belajar, melainkan tempat mengajar bagi para guru, dan tempat diajar bagi para murid.

Sekolah yang memanusiakan manusia agar menjadi berkarakter, berbudaya, dan beradab mempunyai tugas ekstra dalam mengembalikan substansi utama sekolah sebagai tempat belajar. Sebagai tempat belajar, sekolah adalah arena interaksi dialogis, interaktif, dan resiprok antara guru dengan murid. Guru bukanlah aktor yang dominan dan aktif dalam menentukan informasi apa yang berhak diisikan ke dalam otak peserta didik. Sebaliknya, peserta didik bukanlah pihak yang disubordinasi oleh dominasi guru yang selalu harus bersikap pasif. Interaksi yang dibangun antara keduanya haruslah bersifat partisipatoris dengan melibatkan pola komunikasi yang dialogis dan interaksi timbal-balik dua arah. Masing-masing harus bersikap pro-aktif dan senantiasa bekerjasama dalam menciptakan pola belajar yang nyaman dan membebaskan. Dengan hal ini, suasana belajar dapat diwujudkan dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan.

Setiap manusia memiliki intensi yang berbeda dalam belajar. Faktor yang umumnya memengaruhi intensi tiap orang adalah kesesuaian antara stimulus dengan gaya belajar masing-masing orang. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi (DePorter dan Hernacki, 2011). Kemampuan seseorang dalam menyerap informasi sangat ditentukan oleh modalitas belajar orang tersebut; *audio*, *visual*, *audio-visual*, atau *kinestetis*. Tentu saja masing-masing kemampuan ini memerlukan strategi, pendekatan, model, metode, teknik, dan sumber belajar bervariasi dan menghargai kekhasan modalitas belajar siswa, sehingga tidak dapat disamakan antara siswa satu dengan lainnya.

Faktor lain yang sangat menentukan intensi seseorang dalam belajar adalah faktor *needs* atau kebutuhan. *Needs* atau kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh masalah dan tantangan yang ada di lingkungan sosial tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Oleh karena itu, sekolah yang memanusiakan adalah sekolah yang memiliki kurikulum yang kontekstual dengan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan tempat peserta didik hidup. Belenggu kurikulum yang didominasi oleh logika industri-pasar perlu untuk dibongkar dan disesuaikan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan hidup di masyarakat. Belajar yang baik lahir dari adanya dorongan internal individu sebagai manusia yang membutuhkan belajar.

Mendidik untuk Membebaskan

Pendidikan diyakini banyak orang sebagai alat untuk meraih status sosial yang lebih baik. Pendidikan adalah anak tangga untuk meraih kehidupan berkualitas dan *privelese* dalam hidup di masyarakat. Akses yang sama terhadap pendidikan memberi peluang yang sama besar dan adil bagi setiap golongan masyarakat untuk dapat membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan dan dominasi golongan lain. Pendidikan juga merupakan alat rekayasa sosial yang dapat digunakan untuk menata, mengatur, dan membentuk masyarakat dalam kehidupan yang senantiasa berubah di masa yang akan datang (Basri, 2014).

Pada praktiknya, golongan *elit* yang berasal dari golongan menengah-atas memiliki peluang dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik daripada golongan kelas bawah. Kondisi ini semakin lama akan semakin melanggengkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Kelas bawah semakin lama akan teralienasi. Hal ini terjadi karena di sekolah, siswa yang berasal dari kelas menengah-atas akan menjadi kelas menengah-atas ketika dewasa dan begitu juga sebaliknya untuk siswa dari golongan kelas bawah (Maliki, 2010).

Menghadapi situasi semacam ini perlu diupayakan sebuah sistem pendidikan yang mampu mengangkat dan membebaskan masyarakat kelas bawah untuk menikmati anugerah pendidikan. Soedjatmoko menawarkan gagasan alternatif berupa sistem belajar atau pendidikan baru yang berbasis komunitas bukan sistem pendidikan konvensional berbasis pada kelas, di

mana unsur ilmu pengetahuan tradisional digabungkan dengan sains modern lewat perantaraan penguasaan teknologi. Dengan penguasaan teknologi informasi, maka akses terhadap ilmu pengetahuan makin terbuka lebar. Tantangan pendidikan saat ini, kata Soedjatmoko, adalah membawa siswa-siswa dari kalangan miskin (*poor*) dan termarginalkan (*marginalized*) untuk menapatkan akses dan kesempatan menikmati pendidikan dengan keunggulan teknologi dan kecepatan informasi. Sehingga laju perkembangan teknologi dapat diserap dan dikuasai untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya. Lebih lengkapnya Soedjatmoko (2010) menuliskan seperti dikutip sebagai berikut:

“We are challenged to consider the ways in which the poor and the marginalized people of the world can be brought into the communication revolution so that they gain independent access to modern knowledge.”...“Conventional schools and teaching methods cost too much. What is obviously needed is a learning system that is not classroom based, but community based, that we would use a mixture of modern and traditional information sources and technologies. What is needed is “a poor man’s learning system” in which modern knowledge relevant to people’s need is communicated, using multimedia approaches and interactive learning circles, providing information and entertainment in poor urban and rural communities.”

SMP Qaryah Thayyibah di Desa Kalibening Salatiga merupakan contoh otentik dari model sistem pendidikan berbasis komunitas dengan melibatkan partisipasi seluruh anggota komunitasnya (Bahrudin, 2007). Dalam sekolah komunitas, siswa yang sedang belajar menjadikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai pusat pembelajaran yang mampu bergerak dan menampakkan perwujudan kebudayaan dan peradaban secara aktif melalui transformasi budaya dan media dalam masyarakat kontemporer (Bahrudin, 2007). Di Qaryah Thayyibah, model pembelajaran berlangsung dialogis yang menuntut interaksi lebih terbuka antara guru dan murid. Guru menjadi pendamping dan pemantik proses berpikir dan belajar siswa. Pembelajaran dialogis di Qaryah Thayyibah berjalan dengan mengikuti tujuh prinsip, yaitu membebaskan, keberpihakan, partisipatif, berbasis kebutuhan, kerja sama, sistem evaluasi berpusat pada peserta didik, dan percaya diri (Meliya, dkk., 2014).

Di Sekolah Qaryah Thayyibah ini, tujuan pendidikan menyesuaikan dengan basis kecerdasan atau inteligensi anak. Sehingga setiap anak memiliki kebebasan kreativitas dan inovasi sesuai basis potensinya. Selain itu pelaksanaan sekolah berprinsip kepada sekolah bermutu dengan akses pembiayaan murah (Lestari, 2009). Sekolah ini ingin menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas yang hanya bisa diakses oleh sebagian kalangan, umumnya kalangan atas atau kaya, dapat juga dinikmati oleh kalangan bawah atau miskin.

Sekolah Qaryah Thayyibah disebut sebagai sekolah lternatif karena membebaskan peserta didiknya dari baju, kaus olahraga, sepatu dan kaus kaki, yang biasanya dibuat seragam. Buku ajar dan sumber belajar lebih beragam tidak tergantung dengan buku paket dan sumber

belajar yang monoton. Sumber belajar utamanya adalah lingkungan di sekitar sekolah. Kegiatan pembelajaran tidak monoton di dalam sebuah ruangan, sehingga ruang belajar begitu luas dan membuat *mood* siswa terjaga. Guru dan siswa dapat menentukan materi dan tema belajar sesuai dengan keinginan dan kesepakatan (Lestari, 2009).

Hal yang juga dari SMP Qaryah Thayyibah adalah penekanan pada penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa pengetahuan ditunjang serta dengan penggunaan akses internet yang tak terbatas mampu menembus sekat-sekat belajar yang selama ini dibatasi oleh dinding kelas. Model pembelajaran konvensional yang dibatasi dinding kelas ditinggalkan dan mengambil model pembelajaran yang berbasis minat, bakat, intensi, dan masalah di lingkungan sekitar mampu menjadi alternatif model pendidikan yang membebaskan siswa, murah, dan berkualitas. Pendidikan dengan demikian, tidak terpisah dan berjarak dengan permasalahan, tantangan, dan situasi yang muncul di lingkungan terdekatnya.

SIMPULAN

Tulisan ini menguraikan model sekolah menurut salah satu teori dalam Sosiologi; yakni teori struktural konflik. Dalam pandangan struktural konflik, masyarakat selalu berada dalam kondisi yang bertentangan dan konflik. Konflik selalu terjadi akibat adanya dominasi atas satu golongan terhadap golongan lain. Pendidikan dalam kultur industrialisasi yang kental, semakin melanggengkan pertentangan dan konflik antar golongan, yang akibatnya, keadilan tidak dapat terwujud. Upaya perlu dilakukan untuk memunculkan terobosan bentuk dan model pendidikan yang memanusiakan manusia sebagaimana kedudukan asasinya sebagai makhluk Tuhan. Upaya ini dapat dilakukan setidaknya-tidaknya dengan tiga model sistem sekolah yang berorientasi untuk memanusiakan manusia: Sekolah yang mendidik karakter, sekolah yang mendidik untuk belajar, dan sekolah yang mendidik untuk membebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Hernadi. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2, hlm. 218-243.

Anwar, Rosihan. (2011). *Sutan Sajhrir Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya*. Jakarta: Kompas.

Bahrudin, Ahmad. (2007). *Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*. Yogyakarta: LKiS.

Basri, Syafiq. (2014). *Melampaui Mimpi Anis Baswedan*. Bandung: Mizan.

Chatib, Munif. (2012). *Gurunya Manusia*. Bandung: Kaifa.

DePorter, Bobbi dan Mike Hernacki. (2011). *Quantum Learning*. Bandung: Kaifa.

Fadilah, Galbani. (2001). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi". *Journal of Society and Development*, 1, 1. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd>.

Latif, Yudi. (2009). *Menyemai Karakter Bangsa*. Jakarta: Kompas.

Lestari, Puji. (2009). *Aplikasi Home Schooling pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Alternatif Qaryah Tayyibah Kalibening Salatiga*. (Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).

Lickona, Thomas. (2013). *Educating for Character*. Jakarta: Bumi Aksara.

Majalah Sastra Horison. Edisi XLIII, No. 7/2008.

Maliki, Zainuddin. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Meliya, Ika Rizki dkk.. (2014). *Pengelolaan Pembelajaran Dialogis Paulo Freeire Pada Program Paket B di Sekolah Alternatif Qoryah Thayyibah Desa Kalibening Salatiga Jawa Tengah*. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment NFECE*, Vol 3 No. 1.

Nata, Abuddin. (2012). *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Kencana, cet. Ke-5.

Nugroho, Ari Cahyo. (2021). *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)*. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 2, hlm. 185-194.

Soedjatmoko. (2010). *Menjadi Bangsa yang Terdidik Menurut Soedjatmoko*. Jakarta: Kompas.

Swasono, Meutia Farida (penyunting). (1980). *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: UI Press.

Tualeka, M Wahid Nur. (2017). *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>

Tumengkol, Selvie M. (2012). *Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado).